

Judul : Presiden akan bentuk komisi reformasi Polri
Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Presiden Akan Bentuk Komisi Reformasi Polri

Rencana Pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri sedang ramai dibahas. Rencana ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR, tapi mendapat catatan kritis dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasaran Yusril Isha Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres), terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri. Yusril, mengatakan, tim yang tergabung dalam Komisi Reformasi Polri itu akan dilantik dalam waktu dekat.
"Belum (ada target), kalau itu memang sudah disiapkan Keppresnya dan mungkin akan segera dilantik ya (tim) sehari dua hari ini, dan kita lihatlah dalam Keppresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu," kata Yusril di kantor Kemenko Kuman Imigrasi, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Yusril mengungkapkan, Presiden Prabowo menyampaikan

bahwa Komisi Reformasi Polri akan bekerja beberapa bulan. Salah satu tugas tim ini adalah merumuskan reformasi Polri dengan melakukan pengkajian ulang kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan kepolisian.
"Merumuskan perubahan-perubahan dan syarat-syarat itu, (lalu) akan diserahkan kepada Presiden nantinya," ujarnya.
Selanjutnya, kata Yusril, hasil rumusan tersebut akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Yusril menambahkan, undang-undang yang sudah diberlakukan lebih dari 20 tahun itu, sudah harus dievaluasi kembali.
"Dengan menyesuaikan keadaan sekarang, dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi Kepolisian kita," ucap dia.
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi Kepolisian. Persetujuan ini disampaikan Prabowo, saat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) selama tiga jam, sejak pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mendukung langkah Presiden terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri ini. Dia meyakini, apa yang dilakukan Prabowo, merupakan yang terbaik untuk institusi Polri.
"Selaku Kepala Negara, pasti beliau yang paling paham apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki dalam institusi Kepolisian," ujar Rudianto kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (17/9/2025).
Sementara itu, Peneliti ICJR Ifitahsari mawanti-wanti, agar Komisi Reformasi Polri ini bukan hanya formalitas saja. Dia juga berharap, orang-orang yang berada di Komisi Reformasi Polri memiliki kompetensi.
"Kami masih melihat komponen timnya seperti apa, pembentukannya apakah transparan, apakah diisi oleh orang-orang yang berintegritas, kompeten," ujar Ifitahsari kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (17/9/2025).
Untuk mengetahui pandangan dari Rudianto Lallo dan Ifitahsari mengenai pembentukan Komisi Reformasi Polri, berikut wawancaranya.

IFTITAHSARI

Peneliti ICJR

Kami Berharap Timnya Tak Sekadar Formalitas



“Kalau bisa tim ini punya *work plan* yang jelas, nggak cuma selesai kasih rekomendasi, terus ditaruh rekomendasi tersebut di atas mejanya Presiden.

Apa catatan Anda terkait rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri ini?
Sebenarnya, ICJR dan kami punya Koalisi Reformasi Polri (KRP) sudah lama menyuarakan itu. Kebutuhan mereformasi Polri ini sudah mendasar. Namun, teknisnya harus melalui tim reformasi khusus Polri atau bagaimana, itu sebetulnya yang kami pertanyakan dari teman teman koalisi.
Memang kenapa?
Karena kami melihat, kalau misalnya di timnya hanya sekedar formalitas dan kami berkecand dengan yang sebelum sebelumnya, ya jadi nggak berdampak juga kan.
Jadi kami masih melihat lagi nih, komponen timnya seperti apa, pembentukannya apakah transparan, apakah diisi oleh orang-orang yang berintegritas, kompeten, dan yang penting nggak punya konflik kepentingan.

Anda menilai orang-orang yang ada di tim Komisi Reformasi Polri harus memiliki kriteria tersebut?
Iya yang nanti akan menentukan arah yang akan dihasilkan oleh tim tersebut. Apakah cuma jadi normatif saja, atau benar benar *impactful* dan mengikat. Nah itu yang kami kritik di situ.
Kalau misalnya nggak ada jaminan itu, ya buat apa. Sebetulnya, yang kita perlukan itu reformasi Polri, bukan *gimmick gimmick* pembentukan timnya.
Menurut Anda, siapa yang cocok menjadi anggota tim Komisi Reformasi Polri ini?
Berdasarkan indikator, misal latar belakangnya seperti apa. Apakah punya kompetensi atau keahlian untuk menggali dan melihat jernih sembarang masalah sistem.
Jadi harus seperti apa anggota timnya?

Orang yang paham birokrasi, paham HAM dan paham bagaimana *security policy* itu dibentuk.
Jadi secara kompetensi itu harus dijamin. Kemudian yang paling penting adalah nggak punya konflik kepentingan dan berintegritas. Kan juga muncul ya, usulan agar mantan-mantan petinggi Polri (mengisi tim Komisi Reformasi Polri).
Kami mencoba mencermati argumennya, langkah itu supaya tahu dalamnya seperti apa, birokrasi seperti apa, segala macam. Namun menurut kami, nggak harus mereka langsung di dalam timnya.
Seharusnya bagaimana?
Bisa jadi *reviewer*nya atau memang jadi sumber informasi. Tapi bukan masuk timnya sendiri. Jadi hal itu yang sebetulnya harus paling penting untuk dihindari. Sehingga apa yang mereka rekomendasikan, bisa ditindaklanjuti. ■ **news**

RUDIANTO LALLO

Anggota Komisi III DPR

Presiden Tahu Apa Yang Perlu Dibenahi

“Bukan hanya Polri yang perlu direformasi, tapi juga seluruh institusi cabang kekuasaan. Apakah itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif.



Bagaimana Anda melihat rencana Pemerintah membentuk Komisi Reformasi Polri?
Kami menghormati dan mendukung langkah langkah Presiden Prabowo Subianto, terkait dengan rencana pembentukan Komisi Reformasi Polri. Karena Presiden, selaku Kepala Negara, beliau yang paling tahu.
Maksudnya?
Ya karena Polri merupakan institusi alat negara, di bidang keamanan ketertarikan masyarakat. Bertugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan serta penegakan hukum. Kami setuju dalam rangka rangka perbaikan dalam institusi Polri.
Reformasi Polri di mata Anda seperti apa?
Bukan hanya Polri yang perlu direformasi, tapi juga seluruh institusi cabang kekuasaan. Apakah itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Karena semangatnya untuk perubahan atau

perbaikan ke arah yang lebih baik.
Lantas, hal apa saja yang perlu direformasi?
Ada banyak hal yang mungkin terkait dengan bagaimana strukturnya, budayanya, dan struktur dalam Polri. Sepanjang itu berkaitan dengan wewenang fungsi dan tugas Polri, sebagaimana dalam konstitusi Pasal 34, tentu saja kami sendiri mendukung upaya upaya dalam rangka perbaikan tersebut. Kita kira begitu.
Selama ini Anda melihat kinerja Polri seperti apa?
Tentu dengan tugas tugas Polri seperti melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. Itu akan jadi pertanyaan. Apakah selama ini Polri dalam mengayomi, melindungi masyarakat atau berkomunikasi masih kurang? Kalau masih kurang, ayo kita perbaiki.
Selain itu, apa lagi yang harus

direformasi?
Apakah selama ini banyak generasi generasi yang misalkan menjadi sebuah diki musuh negara seperti judi online, narkoba, korupsi yang belum efektif, apakah itu yang perlu direformasi? Jika perlu, maka harus mencari anggota Polri yang berintegritas tinggi. Supaya konsisten dan komitmen dalam peningkatan hukum.
ICJR berharap pembentukan Komisi Reformasi Polri bukan hanya *gimmick* saja, namun benar benar melakukan pembenahan di institusi Polri, apa tanggapan Anda?
Tentu Presiden punya niat baik, punya keinginan memperbaiki institusi Polri. Presidenlah yang paling paham, yang paling tahu apa yang harus diperbaiki dalam tubuh Polri. Kita serahkan kepada Pemerintah. Fasalnya, Presiden sebagai Kepala Negara, ditopang dua alat negara, yaitu TNI dan Polri. ■ **news**